



KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PERBENDAHARAAN
KANTOR WILAYAH DIREKTORAT JENDERAL PERBENDAHARAAN
PROVINSI JAWA TIMUR
KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA TIPE A2
BOJONEGORO

JALAN UNTUNG SUROPATI NO. 63, BOJONEGORO 62115; TELEPON (0353) 881832; FAKSIMILE (0353) 881309;
SUREL KPPN073@KEMENKEU.GO.ID; LAMAN WWW.DJPB.KEMENKEU.GO.ID/KPPN/BOJONEGORO

Nomor : S-372/KPN.1612/2022 25 April 2022
Sifat : Segera
Lampiran : Satu Berkas
Hal : Penyampaian Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Triwulan I 2022 Satker K/L

Yth. Para Kuasa Pengguna Anggaran Satuan Kerja di Wilayah Kerja KPPN Tipe A2 Bojonegoro

Sehubungan dengan penilaian IKPA Triwulan I 2022 berdasarkan Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-5/PB/2022 tentang Petunjuk Teknis Penilaian Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran Belanja Kementerian Negara/Lembaga, bersama ini kami sampaikan sebagai berikut:

1. Dalam rangka mewujudkan belanja Kementerian Negara/Lembaga yang lebih berkualitas, lebih baik (*spending better*), dan sesuai dengan tata kelola yang baik (*good governance*) serta memberikan penilaian indikator kinerja pelaksanaan anggaran yang lebih transparan dan akuntabel, pada tahun 2022 telah dilakukan reformulasi penilaian IKPA.
2. Penilaian IKPA tahun 2022 meliputi tiga aspek sebagai berikut:
 - a. Aspek kualitas perencanaan anggaran yang terdiri dari dua indikator, yaitu Revisi DIPA dan Deviasi Halaman III DIPA;
 - b. Aspek kualitas pelaksanaan anggaran yang terdiri dari lima indikator, yaitu Penyerapan Anggaran, Belanja Kontraktual, Penyelesaian Tagihan, Pengelolaan UP dan TUP, dan Dispensasi SPM; dan
 - c. Aspek kualitas hasil pelaksanaan anggaran yang terdiri dari satu indikator, yaitu Capaian Output.
3. Pada Triwulan I 2022 tidak dilakukan penilaian pada indikator kinerja Revisi DIPA dan Penyerapan Anggaran (nilai indikator memiliki bobot 0).
4. Berdasarkan capaian seluruh satker K/L, rata-rata nilai IKPA Triwulan I 2022 51 satker K/L di wilayah kerja KPPN Tipe A2 Bojonegoro adalah sebesar **86,62**. Hasil penilaian adalah sebagaimana terlampir.
5. Hasil penilaian IKPA 51 satker K/L tersebut dapat diklasifikasikan sebagai berikut:
 - a. Sangat baik (Nilai IKPA ≥ 95) sebanyak 14 satker atau sebesar 27,45%
 - b. Baik ($89 \leq$ Nilai IKPA < 95) sebanyak 9 satker atau sebesar 17,65%
 - c. Cukup ($70 \leq$ Nilai IKPA < 89) sebanyak 23 satker atau sebesar 45,10%
 - d. Kurang (Nilai IKPA < 70) sebanyak 5 satker atau sebesar 9,80%
6. Kami menyampaikan apresiasi setinggi-tingginya kepada 4 satker K/L atas inisiatif dan upaya maksimalnya dalam mewujudkan tata Kelola pelaksanaan anggaran dengan sangat baik. Hal tersebut dibuktikan dengan nilai IKPA Triwulan I 2022 yang telah tercapai optimal sebesar **100**.
7. Selanjutnya, dalam rangka menjaga dan meningkatkan capaian nilai IKPA pada periode Triwulan II 2022, satker K/L agar melaksanakan langkah-langkah sebagai berikut:

a. Revisi DIPA

- 1) Melakukan revidi atas DIPA secara periodik (minimal sekali di akhir triwulan) dan mengendalikan serta mengoptimalkan revisi anggaran dalam hal diperlukan penyesuaian kebijakan program/ kegiatan pada satker K/L.
- 2) Mempersiapkan dokumen yang diperlukan apabila masih terdapat anggaran yang diberikan catatan dalam DIPA (tanda blokir) dan segera menyelesaikan pada Triwulan II.
- 3) Meminimalisir revisi pergeseran antarjenis belanja di akhir triwulan yang dapat menyebabkan *trajectory* penyerapan anggaran berubah.

b. Deviasi Halaman III DIPA

- 1) Merevidi rencana kegiatan secara periodik dan prognosis penyerapan anggaran (minimal sekali di akhir triwulan), serta menyusun rencana penarikan dana masing-masing jenis belanja.
- 2) Menyelaraskan RPD Halaman III DIPA dengan target penyerapan anggaran triwulanan. Dalam hal terdapat perubahan komposisi pagu per jenis belanja, agar memperhatikan perubahan target penyerapan anggaran dan melakukan penyesuaian pada RPD Halaman III DIPA.
- 3) Mengajukan revisi Halaman III DIPA sebelum batas akhir *cut off* RPD triwulanan dalam rangka penilaian IKPA.

c. Penyerapan Anggaran

- 1) Memperbaiki perencanaan dan eksekusi kegiatan secara relevan dan terjadwal, serta tidak menumpuk pencairan anggaran pada akhir tahun.
- 2) Melakukan percepatan belanja, khususnya untuk belanja barang dan modal yang proses pengadaan barang dan jasanya dapat dimulai sejak awal tahun anggaran.
- 3) Mengoptimalkan penyerapan anggaran secara proporsional setiap bulan berdasarkan target, rencana kegiatan, dan rencana penarikan dana yang telah disusun.

d. Belanja Kontraktual

- 1) Menyiapkan dokumen dan segera melakukan pendaftaran kontrak ke KPPN.
- 2) Memastikan pengadaan barang jasa yang sifatnya sekaligus dan nilainya s.d. Rp200 juta diselesaikan pada Triwulan II (apabila belum terselesaikan pada Triwulan I).
- 3) Mengidentifikasi dan mempersiapkan PBJ tahun anggaran mendatang untuk dilakukan percepatan lelang dan penandatanganan kontrak segera setelah DIPA ditetapkan.

e. Penyelesaian Tagihan

- 1) Segera menyelesaikan pembayaran dan tidak menunda proses penyelesaian tagihan yang pekerjaannya telah selesai (termasuk pekerjaan termin).
- 2) Memperhatikan ketentuan penyelesaian tagihan dalam 17 hari kerja sejak timbulnya hak tagih kepada negara.
- 3) Lebih teliti, lengkap, dan akurat dalam pengisian uraian pada SPM terutama untuk tanggal dan nomor BAST/BAPP. Tanggal BAST berlaku apabila pekerjaan (barang/jasa) telah diserahterimakan seluruhnya, sementara tanggal BAPP berlaku apabila pekerjaan (barang/jasa) dilakukan secara bertahap untuk pembayaran berdasarkan termin.

f. Pengelolaan UP dan TUP

- 1) Menghitung kembali kebutuhan operasional bulanan Satker dan mengajukan UP Tunai secara rasional sesuai kebutuhan bulanan Satker.

- 2) Menggunakan UP Tunai secara efektif dan efisien dengan mempercepat revolving UP Tunai paling sedikit 100% dalam satu bulan.
 - 3) Dalam mengajukan TUP Tunai, agar menyusun rencana penggunaan dan pengeluaran dalam satu bulan secara efektif dan meminimalkan setoran.
 - 4) Memonitor status penggunaan UP/TUP Tunai pada Aplikasi OMSPAN (Karwas UP/TUP dan detail data IKPA UP/TUP).
 - 5) Dalam hal Satker memiliki BPP, agar melakukan konsolidasi atas penggunaan UP di masing masing BPP dan mengajukan GUP ke KPPN apabila telah digunakan minimal 50% dari total UP yang dikelola.
 - 6) Menyetor sisa dana UP/TUP Tunai yang berada di Bendahara Pengeluaran/BPP sebelum akhir tahun anggaran berakhir.
- g. Dispensasi SPM
- 1) Memantau progres penyelesaian kegiatan sesuai rencana.
 - 2) Menetapkan mitigasi risiko penyelesaian pekerjaan dan pembayaran menjelang akhir tahun anggaran.
 - 3) Menghitung prognosis belanja agar dapat dieksekusi tepat waktu untuk menghindari penumpukan pencairan anggaran pada akhir tahun.
- h. Capaian Output
- 1) Menetapkan metode perhitungan capaian output untuk setiap RO yang dikelola.
 - 2) Secara periodik menghitung tingkat kemajuan aktivitas (progres/PCRO) dan capaian (Realisasi Volume RO), memperhatikan gap progres capaian output dengan penyerapan anggaran.
 - 3) Melakukan pengisian data capaian output bulanan secara akurat dan disiplin sebelum batas akhir *open period* reguler (5 hari kerja setelah bulan berakhir).
 - 4) Memonitor status data pada aplikasi OMSPAN dan memastikan status data telah Terkonfirmasi.
 - 5) Meningkatkan koordinasi antar PPK, dan PPK dengan pengelola kegiatan dalam melakukan pengawasan, perhitungan, dan pelaporan data capaian output.

Demikian kami sampaikan, atas perhatian dan kerja samanya kami ucapkan terima kasih.

Kepala Kantor,



Ditandatangani secara elektronik
Saiful Huda

Tembusan:

Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Jawa Timur

LAMPIRAN

Surat Kepala KPPN Tipe A2 Bojonegoro

Nomor : S-372/KPN.1612/2022

Tanggal : 25 April 2022

**HASIL PENILAIAN IKPA PERIODE TRIWULAN I 2022 SATKER K/L
DI WILAYAH KERJA KPPN TIPE A2 BOJONEGORO**

No.	Kode Satker	Nama Satuan Kerja	Kualitas Perencanaan Anggaran		Kualitas Pelaksanaan Anggaran					Kualitas Hasil Pelaksanaan Anggaran	Nilai IKPA	Kategori
			Revisi DIPA	Deviasi Hal III DIPA	Penyerapan Anggaran	Belanja Kontraktual	Penyelesaian Tagihan	Pengelolaan UP/TUP	Dispensasi SPM	Capaian Output		
1.	405120	LEMBAGA PEMASYARAKATAN BOJONEGORO	100	100	100	100	100	100	100	100	100	SANGAT BAIK
2.	019330	BADAN PUSAT STATISTIK KAB. BOJONEGORO	100	100	94,6	100	100	100	100	100	100	SANGAT BAIK
3.	119588	KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA BOJONEGORO	100	100	100	N/A	N/A	100	100	100	100	SANGAT BAIK
4.	410914	KANTOR PENGAWASAN DAN PELAYANAN BC BOJONEGORO	100	100	100	N/A	N/A	100	100	100	100	SANGAT BAIK
5.	663619	KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA LAMONGAN	100	100	100	N/A	N/A	100	100	99,36	99,68	SANGAT BAIK
6.	401307	PENGADILAN AGAMA BOJONEGORO	100	100	100	100	100	100	100	98,98	99,64	SANGAT BAIK
7.	417865	KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KAB. BOJONEGORO	100	93,19	100	N/A	N/A	N/A	100	100	98,3	SANGAT BAIK



No.	Kode Satker	Nama Satuan Kerja	Kualitas Perencanaan Anggaran		Kualitas Pelaksanaan Anggaran					Kualitas Hasil Pelaksanaaan Anggaran	Nilai IKPA	Kategori
			Revisi DIPA	Deviasi Hal III DIPA	Penyerapan Anggaran	Belanja Kontraktual	Penyelesaian Tagihan	Pengelolaan UP/TUP	Dispensasi SPM	Capaian Output		
8.	425828	MADRASAH ALIYAH NEGERI 1 LAMONGAN	100	88,52	95,86	N/A	N/A	100	100	100	97,7	SANGAT BAIK
9.	527488	KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA BOJONEGORO	100	88,2	99,24	N/A	N/A	100	100	100	97,64	SANGAT BAIK
10.	573247	MADRASAH TSANAWIYAH NEGERI 3 BOJONEGORO	100	84,76	100	N/A	N/A	100	100	100	96,95	SANGAT BAIK
11.	644381	POLRES BOJONEGORO	100	100	100	100	100	100	100	88,22	95,79	SANGAT BAIK
12.	019351	BADAN PUSAT STATISTIK KAB. LAMONGAN	100	67,93	81,98	100	100	100	100	100	95,42	SANGAT BAIK
13.	425670	MADRASAH TSANAWIYAH NEGERI 2 LAMONGAN	100	77,04	99,38	N/A	N/A	100	100	100	95,41	SANGAT BAIK
14.	424678	MADRASAH TSANAWIYAH NEGERI 1 LAMONGAN	100	75,45	94,29	N/A	N/A	100	100	100	95,09	SANGAT BAIK
15.	098146	PENGADILAN NEGERI LAMONGAN	100	75,04	100	100	100	87,5	100	100	94,65	BAIK
16.	425730	MADRASAH TSANAWIYAH NEGERI 2 BOJONEGORO	100	69,94	86,31	N/A	N/A	100	100	100	93,99	BAIK
17.	604922	MADRASAH ALIYAH NEGERI 3 BOJONEGORO	100	67,5	85,85	N/A	N/A	100	100	100	93,5	BAIK
18.	644400	POLRES LAMONGAN	100	100	100	100	100	100	100	77,36	91,92	BAIK
19.	405132	LAPAS LAMONGAN	100	100	100	100	100	100	100	76,55	91,63	BAIK
20.	573230	MADRASAH TSANAWIYAH NEGERI 4 BOJONEGORO	100	53,71	95,55	N/A	N/A	100	100	100	90,74	BAIK

No.	Kode Satker	Nama Satuan Kerja	Kualitas Perencanaan Anggaran		Kualitas Pelaksanaan Anggaran					Kualitas Hasil Pelaksanaan Anggaran	Nilai IKPA	Kategori
			Revisi DIPA	Deviasi Hal III DIPA	Penyerapan Anggaran	Belanja Kontraktual	Penyelesaian Tagihan	Pengelolaan UP/TUP	Dispensasi SPM	Capaian Output		
21.	417890	KANTOR KEMENTERIAN. AGAMA KAB. LAMONGAN	100	68,78	94,48	100	N/A	100	100	89,23	90,31	BAIK
22.	644113	RUMKIT BHAYANGKARA WAHYU TUTUKO BOJONEGORO	100	45,31	N/A	100	100	100	100	98,13	90,11	BAIK
23.	554375	MADRASAH ALIYAH NEGERI 2 LAMONGAN	100	48,13	100	N/A	N/A	100	100	100	89,63	BAIK
24.	521395	UNIT PENYELENGGARA PELABUHAN BRONDONG	100	48,23	100	100	100	100	100	89,55	88,87	CUKUP
25.	675289	MADRASAH ALIYAH NEGERI 5 BOJONEGORO	100	43,11	96,62	N/A	N/A	100	100	100	88,62	CUKUP
26.	099135	PENGADILAN NEGERI BOJONEGORO	100	68,69	100	N/A	N/A	100	100	89,51	88,5	CUKUP
27.	598919	MADRASAH TSANAWIYAH NEGERI 5 BOJONEGORO	100	41,41	100	N/A	N/A	100	100	100	88,28	CUKUP
28.	417878	MADRASAH ALIYAH NEGERI 2 BOJONEGORO	100	40,27	84,93	N/A	N/A	100	100	100	88,05	CUKUP
29.	308784	MADRASAH TSANAWIYAH NEGERI 1 BOJONEGORO	100	40,09	77,95	N/A	N/A	100	100	100	88,02	CUKUP
30.	401308	PENGADILAN AGAMA BOJONEGORO	100	100	100	N/A	N/A	100	100	73,97	86,98	CUKUP
31.	423852	MADRASAH ALIYAH NEGERI 1 BOJONEGORO	100	29,08	100	N/A	N/A	100	100	100	85,82	CUKUP
32.	005765	KEJAKSAAN NEGERI LAMONGAN	100	35,82	82,36	N/A	N/A	100	100	96,12	85,23	CUKUP
33.	401322	PENGADILAN AGAMA LAMONGAN	100	100	98,72	80	100	100	100	65	84,64	CUKUP
34.	430266	KANTOR PERTANAHAN KAB. LAMONGAN	100	72,04	28,49	100	100	100	100	60,17	81,78	CUKUP

No.	Kode Satker	Nama Satuan Kerja	Kualitas Perencanaan Anggaran		Kualitas Pelaksanaan Anggaran					Kualitas Hasil Pelaksanaaan Anggaran	Nilai IKPA	Kategori
			Revisi DIPA	Deviasi Hal III DIPA	Penyerapan Anggaran	Belanja Kontraktual	Penyelesaian Tagihan	Pengelolaan UP/TUP	Dispensasi SPM	Capaian Output		
35.	098125	PENGADILAN NEGERI BOJONEGORO	100	67,19	100	N/A	N/A	100	100	76,67	81,77	CUKUP
36.	657689	KPU KABUPATEN BOJONEGORO	100	77,26	85,05	N/A	N/A	100	100	69,92	80,41	CUKUP
37.	430250	KANTOR PERTANAHAN KAB. BOJONEGORO	100	21,99	32,56	100	100	100	100	75,93	80,26	CUKUP
38.	401323	PENGADILAN AGAMA LAMONGAN	100	100	99	N/A	N/A	100	100	58	79	CUKUP
39.	417866	KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KAB. BOJONEGORO	100	64,97	75,4	N/A	N/A	100	100	72	78,99	CUKUP
40.	427692	PELABUHAN PERIKANAN NUSANTARA BRONDONG	100	45,23	82,67	67,62	100	100	100	74,8	78,55	CUKUP
41.	675251	MADRASAH ALIYAH NEGERI 4 BOJONEGORO	100	62,36	98,09	N/A	N/A	75	100	80,47	77,71	CUKUP
42.	657740	KPU KABUPATEN LAMONGAN	100	51,74	85,5	N/A	N/A	100	100	74,5	77,6	CUKUP
43.	099137	PENGADILAN NEGERI LAMONGAN	100	45,34	75,53	N/A	N/A	100	100	76,67	77,4	CUKUP
44.	417892	KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KAB. LAMONGAN	100	66,32	80,23	100	N/A	100	100	55,45	75,83	CUKUP
45.	417863	KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KAB. BOJONEGORO	100	69,26	85,57	N/A	N/A	100	100	58	72,85	CUKUP
46.	005730	KEJAKSAAN NEGERI BOJONEGORO	100	41,37	99,95	N/A	N/A	100	100	64,43	70,49	CUKUP
47.	405102	BALAI PEMASYARAKATAN BOJONEGORO	100	31,55	100	100	N/A	100	100	52,07	68,62	KURANG
48.	417894	KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KAB. LAMONGAN	100	45,76	87,58	N/A	N/A	100	100	58	68,15	KURANG

No.	Kode Satker	Nama Satuan Kerja	Kualitas Perencanaan Anggaran		Kualitas Pelaksanaan Anggaran					Kualitas Hasil Pelaksanaan Anggaran	Nilai IKPA	Kategori
			Revisi DIPA	Deviasi Hal III DIPA	Penyerapan Anggaran	Belanja Kontraktual	Penyelesaian Tagihan	Pengelolaan UP/TUP	Dispensasi SPM	Capaian Output		
49.	417864	KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KAB. BOJONEGORO	100	52,9	58,95	N/A	N/A	100	100	53,33	67,25	KURANG
50.	417862	KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KAB. BOJONEGORO	100	38,81	98,46	N/A	N/A	100	100	56,96	66,24	KURANG
51.	417893	KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KAB. LAMONGAN	100	33,67	81,59	N/A	N/A	100	100	53,33	63,4	KURANG
RATA-RATA			100	67,41	90,45	96,92	100	99,25	100	84,56	86,62	CUKUP

Disclaimer:

Sesuai Perdirjen Perbendaharaan Nomor PER-5/PB/2022, indikator Revisi DIPA dan Penyerapan Anggaran tidak dihitung di Triwulan I 2022